

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus S Sadana. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Akademik, T. P. B. P. P., & Pasundan, F. H. U. (2020). *Buku Panduan Penyelenggaraan Akademik.*
- Aksinuddin, Saim. (2022). *Hukum Pertanahan Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia.* Intelegensia Media, Malang.
- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan.* Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia
- Diantha, I made Pasek, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* Prenada Media.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum.* UPT. Mataram University Press, Mataram.
- Efendi, J., & Johnny, I (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Prenada Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi.* Alfabeta.
- Ismail, Dian Ekawaty. (2019). *Hukum Tata Ruang, Rekontruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh.* Ull Press. Jogjakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum.* Kencana. Jakarta
- M Amir Salipu, 2023. *Pengantar Perumahan dan Permukiman Tinjauan Tentang Standar Dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern Dan Tradisional.* DEEPUBLISH DIGITAL. Yogyakarta
- Nasihudin, Abdul Aziz. Arief, Eko. Sulyanti. Dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila.* CV. Elvaretta Buana. Tasikmalaya.
- Nugroho, Sigit Sapto, Haryani, Anik Tri, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum.* Oase Pustaka.

- Nurwadani, Paristiyanti. Saksama, Hestu Yoga. Kuswanjono, Arqom, Dkk. (2016). *PENDIDIKAN PANCASILA*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016. Jakarta.
- Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*.
- Rahardjo, Satjipto (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sari, Anita. (2023). *Dasar Dasar Metode Penelitian*. CV Angkasa Pelangi. Jayapura
- Satjipto Rahardjo, dikutip dari Ahmad Redi. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Sulistyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K Media. Jogjakarta.
- Sunarti. 2019. *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*. Undip Press Semarang. Semarang
- Topan, Rendra. (2019). *Panduan Lengkap Hukum Rumah Susun di Indonesia*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No.829/Menkes/SK/VII/1999

C. JURNAL DAN SUMBER LAIN

- Afinnas, Muhammad Agil Aufa. (N D). *Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan*. Prosiding Seminar Hukum Aktual.

Aurellia, Anindyadevi. (2024). *Sebaran Penduduk Kota Bandung, Daerah Terpadat di Jawa Barat*. Detik.com

Aurelia Salu, Jemmy Sondakh, dan Marhcel R. Maramis. (2025). *KAJIAN HUKUM TANGGUNGJAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN VIOLA DI MINAHASA UTARA TERHADAP KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN*. Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Manado.

Caritra. (2020). *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung*.
<https://www.caritra.org/>

(Dolfi Sandag. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011*. Lex et Societatis. Manado

Hendra Maska Suwardja. (2019). *IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MEDAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN*. Jurnal Publik Reform. Medan.

Lesmana, Teddy. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University

Muhammad Ananta Firdausa , Rudy Indrawanb Noor Hafidahc Risni Ristiawati). (2024). *PENDEKATAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN. SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH*. Banjarmasin

Mundok, Zilva. Rotinsulu, Tri Oldy. Masloman, Irawaty. (2022). *Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rtlh) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi. Manado

Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya (2021). *KAJIAN TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Surabaya.

Ni Ketut Sudianing, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, dan Luh Nila Winarni (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG (Studi*

Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No.1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Locus Majalah Ilmiah FISIP. Buleleng.

Perkim, Banda Aceh. (2017). *Syarat Pemukiman Sehat.*
<https://perkim.bandaacehkota.go.id/>

Rindarjono, Mohammad Gamal. (2010). *Perkembangan Permukiman Kumuh di Kota Semarang Tahun 1980-2006.* Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sembiring, Riky. (2018). *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.* Jurnal Aktual Justice. Denpasar)

Sulaiman. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).* Jurnal HAKAM. Tarakan.

Yani Pujiwati, Betty Rubiati. (2017). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.* Acta Diurnal. Bandung.